

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan batasan terhadap norma-norma, nilai-nilai sosial, serta reaksi sehingga diharapkan dapat mendorong organisasi berperilaku dengan memperhatikan nilai-nilai sosial dilingkungan perusahaan. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi (Widiawati,2012).

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*) (Harahap,2011:72).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa program CSR dilakukan perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Apabila perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, maka perusahaan dapat terus bertahan dan berkembang ditengah-tengah masyarakat serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang.

### 2.1.2 Teori Stakeholders

Teori *stakeholder* menyatakan *stakeholder* sebagai pengambil keputusan muslim yang mengharapkan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial berbasis syariah, sehingga membuktikan perusahaan beroperasi sesuai hukum islam. Semakin kuat posisi *stakeholder*, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mangadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholder*-nya (Lestari 2015). *Stakeholder* adalah setiap individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Hal pertama mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholders dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya (Harahap,2011:77).

Berdasarkan kedudukan *stakeholders* dalam pengelolaan perusahaan, *stakeholders* dibagi menjadi dua kategori :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. *Stakeholders* internal

*Stakeholders* ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Yang termasuk kedalam *stakeholders* internal adalah pemegang saham, para manajer, dan karyawan.

#### 2. *Stakeholders* eksternal

*Stakeholders* eksternal yaitu orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan dan bukan pula karyawan perusahaan tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk kategori *stakeholders* eksternal adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, komunitas lokal, dan masyarakat umum. (Solihin,2009:52)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholders* menjelaskan tentang perusahaan sebagai sebuah entitas yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya untuk kepentingan perusahaannya saja melainkan juga harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan perusahaan, seperti: manajer, karyawan, konsumen, pemasok, investor, kreditor, pemerintah, *stakeholders*, serta masyarakat sekitar perusahaan.

### 2.1.3 Teori Agensi

Pada teori keagenan dijelaskan bahwa sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu antara principal dan agen. Dimana pemegang saham bertindak sebagai principal dan manajemen perusahaan bertindak sebagai

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agen. Principal sebagai pemilik modal mempercayai pengelolaan perusahaan kepada agen sebagai tenaga profesional untuk memaksimalkan keuntungan. Principal hanya bertugas untuk mengawasi dan memonitori jalannya perusahaan serta mengembangkan sistem intensif agar agen bekerja dengan kepentingan perusahaan. Namun dengan adanya pemisahan fungsi pengelolaan ini bisa menimbulkan dampak yang negatif. Keleluasaan yang diberikan principal kepada agen dalam mengelola perusahaan bisa mendorong agen untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing pihak terinovasi untuk memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan principal (Sutedi 2011:16). Principal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan, salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang mereka miliki. Sedangkan agen menginginkan kepentingan diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerja yang telah mereka lakukan.

#### 2.1.4 Pengungkapan (Disclosure)

Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi, sedangkan Raditya (2012) menyatakan bahwa bagi pihak di luar manajemen, laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka melihat kondisi perusahaan tersebut. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.

Ada dua macam tipe pengungkapan dalam laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*).

1. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

Pengungkapan ini merupakan pengungkapan pada bagian dalam laporan keuangan yang disyaratkan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), namun sebelum dikeluarkan keputusan Bapepam Nomor 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai laporan tahunan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah meliputi semua pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

2. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk kedalam kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua pengungkapan sukarela perusahaan ini sering kali diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun sekarang ini cukup banyak perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang terpisah dari laporan tahunan dalam bentuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Dalam ekonomi islam, akuntabilitas dibutuhkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar dan adil serta transparasi. Akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT. Konsep dasar akuntabilitas islam percaya bahwa seluruh sumber daya yang tersedia untuk individu ada dalam bentuk kepercayaan. Oleh karena itu, pengungkapan fakta keuangan harus berisi informasi yang benar, akurat, dan tersedia bebas untuk pengguna laporan keuangan.

#### 2.1.5 Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut The World Bussines Council for Sustainable Development (*WBCSD*) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melau kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat, maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat bagi bisnis maupun untuk pembangunan. CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan. (Untung, 2008:1). Sedangkan menurut (Hery,2012:138) CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi,

dan lingkungan, serta terus menjaga agar dampaknya tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pengertian CSR secara umum adalah dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan masyarakat secara setara dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya bantuan dana, bantuan tenaga ahli, bantuan barang dan lain-lain CSR diungkapkan didalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. Laporan tersebut merupakan pelaporan mengenai kebijakan ekonomi lingkungan dan sosial, pengaruh, serta kinerja organisasi dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

### 2.1.6 Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wadah investasi bagi masyarakat ialah pasar modal. Berdasarkan undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal lebih dikenal dengan sebutan bursa efek.

Beberapa tahun terakhir, perkembangan pasar modal tidak hanya terjadi pada pasar modal konvensional, tetapi juga telah berkembang pada pasar modal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah. Pasar modal syariah diartikan BAPEPAM sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah dipasar modal bersumber dari al-qur'an dan hadist dan kegiatan pasar modal syariah dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi muamalah. Menurut kaidah fikih yang terdapat dalam Fatwa DSN No:40/DSN-MUI/X/2003 yang berbunyi “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Sejarah perkembangan pasar modal syariah diawali sejak di terbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 juli 1997. Pada 3 juli 2000, Burse Efek Indonesia (BEI) bekerjasama dengan PT. Reksadana Investment Management dalam meluncurkan *Jakarta Islamic Index* dengan tujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dana atau modal yang di miliknya secara syariah. Dimana efek-efek syariah tersebut diatur dalam peraturan BAPEPAM dan LK No.9 A 13 tentang penerbitan Efek syariah dan No.9 A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya BAPEPAM dan LK menerbitkan peraturan No 2 K 1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah dan diikuti dengan peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh bapepam. Perkembangan minat akan efek syariah tersebut hinga akhirnya PT.Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tanggal 12 mei 2011 meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Adapun perbedaan Indeks Saham Syariah Indonesia dengan Jakarta Islamic Index adalah Jakarta Islamic Indeks (JII) hanya terdiri dari 30 saham syariah yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan Indeks Saham



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah Indonesia (ISSI) merupakan cerminan dari pergerakan saham-saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan melalui peraturan Bapepam. Adapun kriteria yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah diantaranya:

1. Surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia.
2. Efek yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
3. Sukuk yang diterbitkan oleh emiten termasuk obligasi syariah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan nya peraturan.
4. Saham reksa dana syariah.
5. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksa dana syariah.
6. Efek berupa saham.
7. Efek syariah yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana pemerintah indonesia menjadi salah satu anggotanya.
8. Efek syariah lainnya.

### 2.1.7 *Islamic Social Reporting (ISR)*

Sejalan dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah (*Islamic Social Reporting*). Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif islam, yaitu: pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*). Islam telah menjelaskan cukup

jelas mengenai hak dan kewajiban bagi individu maupun bagi organisasi berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Hal tersebut dikarenakan islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dimuka bumi.

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna sudah sepatutnya bertakwa kepada Allah SWT. Salah satu bentuk ketakwaan manusia kepada Allah SWT adalah dengan tidak membuat kerusakan dimuka bumi. Salah satu bentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi islam adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal dengan perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa (2002) dalam Othman et al (2009) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Haniffa (2002) dalam Otman et al (2009) membuat lima tema pengungkapan indeks ISR , yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat dan tema lingkungan hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema tata kelola perusahaan. Setiap tema memiliki sub tema sebagai indikator pengungkapan tema tersebut. Berikut enam tema pengungkapan dalam indeks ISR.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pendanaan dan investasi , meliputi :

## a. Riba

Riba berasal dari bahasa arab yang berarti tambahan (Al-Ziyadah) , berkembang (An-nuwuw), meningkat (Al-irtifa') dan membesar (Al-'uluw).

## b. Gharar (ketidakpastian)

Terjadi ketika terdapat *incomplete information* antara kedua belah pihak yang bertransaksi dalam hal kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan dan akad. Salah satu contoh dari transaksi gharar adalah transaksi *lease and purchase* (sewa-beli) karena tidak adanya kepastian dalam akad yang diikrarkan diantara kedua belah pihak.

## c. Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim atas harta benda yang dimiliki ketika telah mencapai nisab. Zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, dan shadaqah. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, cara perhitungannya, dan siapa saja yang boleh menerima harta zakat sesuai apa yang telah diatur oleh Allah SWT.

## d. Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan penghapusan piutang tak tertagih

Penangguhan atau penghapusan utang ditawarkan kepada orang dermawan dimana penangguhan harus dilakukan dengan adanya penyelidikan terlebih dahulu kepada pihak debitur terkait

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakmampuannya dalam pembayaran piutang. Jika pihak yang bersangkutan kaya raya maka pembayaran piutang dapat dicicil. Penangguhan atau penghapusan utang merupakan suatu bentuk sikap tolong-menolong yang dianjurkan didalam islam .

e. *Current value balance sheet*

Dalam ekonomi islam *current value balance sheet* sudah seharusnya dimasukkan sebagai bagian dari persyaratan pelaporan operasi perusahaan. PSAK indonesia masih memberlakukan nilai historis atas nilai-nilai akuntansi pada neraca. Salah satu aspek yang mengandung nilai historis adalah pengukuran setelah pengakuan aset tidak berwujud.

f. *Value added statement*

Menurut (Harahap,2011:482) *Value added statement* berfungsi untuk memberikan informasi tentang nilai tambah yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dan kepada pihak mana nilai tambah itu disalurkan. *Value added statement* merupakan pernyataan yang melaporkan perhitungan nilai tambah beserta pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan perusahaan. Istilah *value added statement* diartikan sebagai laporan pertambahan nilai.

2. Produk dan jasa

a. Produk yang ramah lingkungan (*green product*)

Produk yang ramah lingkungan adalah produk yang berasal dari bahan yang tidak mencemari lingkungan dan kemasannya juga dapat dimanfaatkan sehingga tidak menjadi sampah. Selain itu juga hasil

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksinya tidak mengeluarkan limbah. Setiap perusahaan di seluruh dunia diharapkan menghasilkan produk ataupun jasa yang ramah lingkungan sebagai suatu bentuk partisipasi dalam menjaga dan memelihara lingkungan yang kian mengalami kerusakan.

b. Status kehalalan produk

Pentingnya status kehalalan suatu produk merupakan suatu kewajiban yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya kepada seluruh konsumen yang telah dianjurkan didalam islam. Status kehalalan suatu produk diketahui setelah mendapatkan sertifikat kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

c. Kualitas dan keamanan suatu produk

Setelah produk dinyatakan halal, hal lain yang juga penting untuk perusahaan dalam mengungkapkan produknya adalah mengenai kualitas dan keamanan produk. Produk yang berkualitas dan aman akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap suatu perusahaan.

d. Keluhan konsumen / indikator yang tidak terpenuhi dalam suatu peraturan

Item pengungkapan selanjutnya adalah mengenai keluhan konsumen atau pelayanan pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada produk yang dihasilkan melainkan memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan dengan menyediakan pusat layanan keluhan konsumen setelah proses jual beli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karyawan

Othman et al (2009) memaparkan bahwa masyarakat islam ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan telah diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan, seperti upah, karakteristik pekerjaan, jam kerja per hari, libur tahunan, jaminan kesehatan dan kesejahteraan.

4. Masyarakat

Item-item dalam tema masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sadaqah/donasi, wakaf, qardul hasan, sukarelawan dari pihak karyawan, pemberi beasiswa, pemberdayaan kerja bagi siswa yang lulus sekolah/ kuliah berupa magang dan praktik kerja lapangan. Perusahaan memberikan bantuan dan kontribusi kepada masyarakat dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial dimasyarakat.

5. Lingkungan

Konsep yang mendasari tema lingkungan dalam penelitian ini adalah mizan, i'tidal, khilafah dan akhirah. Konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa item pengungkapan yang berhubungan dengan tema lingkungan yaitu konservasi lingkungan, perlindungan terhadap margasatwa, kegiatan untuk mengurangi efek pemanasan global, pengelolaan limbah dan pengelolaan air bersih.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Tata kelola perusahaan

Konsep yang mendasari tema ini adalah konsep khilafah. Menurut Othman et al (2009), tema tata kelola perusahaan dalam ISR tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan pada aspek syariah perusahaan. Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, penggunaan dana non halal, struktur kepemilikan saham dan kebijakan anti korupsi.

Othman, Thani dan Ghani (2009) melakukan penelitian mengenai praktek pelaporan CSR pada perusahaan syariah yang *listed* di bursa Malaysia, dan hasilnya memperlihatkan bahwa kebanyakan masih pada tahap konseptual. Hal ini dikarenakan belum ada perusahaan yang bisa di adopsi dalam penerapan CSR syariah tersebut. Penelitian CSR syariah biasanya menggunakan model Indeks Syariah Social Reporting yang dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan AAOIFI yang masing-masing dikembangkan oleh peneliti masing-masing. Menurut Haniffa (2002) dalam Othman et al (2009) secara khusus indeks ISR adalah perluasan dari *social reporting* yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas dan karyawan.

**Tabel 2.1 : Indeks Islamic Social Reporting**

No	Pokok pengungkapan	Pengungkapan dalam Laporan tahunan
<b>A</b>	<b>Tema pembiayaan dan investasi</b>	
1	Aktivitas riba	Beban bunga, pendapatan bunga, dll
2	Pengungkapan kegiatan yang mengandung gharar	Spot, forward, margin, trading, dll
3	Zakat	Pengelolaan zakat, pembiayaan zakat
4	Kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan pengungkapan piutang tak tertagih	Kebijakan perusahaan atas keterlambatan pembayaran piutang, kebijakan perusahaan untuk menghapus piutang tak tertagih
5	Pernyataan nilai tambah perusahaan	Nilai tambah perusahaan bagi masyarakat
<b>B</b>	<b>Tema produk dan jasa</b>	
6	Produk atau kegiatan operasi ramah lingkungan	Produk yang ramah lingkungan, memiliki teknologi yang ramah lingkungan
7	Status kehalalan produk	Sertifikat kehalalan produk dari MUI, pernyataan produk halal
8	Keamanan dan kualitas produk	Keamanan produk dan kualitas produk
9	Pelayanan pelanggan (customer oriented)	Pelayanan pasca jual, pengadaan pusat pengaduan konsumen
<b>C</b>	<b>Tema karyawan</b>	
10	Sifat pekerjaan	Jam kerja, hari libur
11	Pendidikan dan pelatihan kerja	Pelatihan kerja, pengembangan sumber daya manusia
12	Kesetaraan hak antara pria dan wanita	Tidak melakukan diskriminasi
13	Keterlibatan karyawan dalam diskusi manajemen dan pengambilan keputusan	Dilibatkannya karyawan dalam diskusi manajemen, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan
14	Kesehatan dan keselamatan kerja	Kesehatan dan keselamatan kerja
15	Lingkungan kerja	Pernyataan tentang lingkungan kerja
16	Karyawan dan kelompok khusus	Karyawan cacat fisik, mantan pecandu narkoba atau mantan narapidana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17	Karyawan tingkat atas melaksanakan ibadah bersama dengan karyawan tingkat menengah dan bawah	Pelaksanaan ibadah secara bersama-sama karyawan tingkat atas dengan karyawan tingkat menengah dan bawah
18	Kewajiban berdo'a selama waktu tertentu dan berpuasa ramadhan pada waktu bekerja	Kewajiban berdo'a, ibadah berpuasa ramadhan, pada saat bekerja atau kegiatan buka puasa bersama
19	Sarana ibadah yang memadai bagi para karyawan	Keterangan untuk sarana ibadah yang memadai bagi para karyawan
<b>D</b>	<b>Tema masyarakat</b>	
20	Sedeqah, donasi atau sumbangan	Sedeqah, donasi atau sumbangan
21	Wakaf	Keterangan tentang pelaksanaan wakaf perusahaan
22	Dana kebajikan (qard hasan)	Keterangan tentang pengelolaan dana kebajikan perusahaan
23	Sukarelawan dari kalangan karyawan	Sukarelawan dari kalangan karyawan dalam kegiatan sosial ataupun kegiatan lainnya
24	Pemberian beasiswa	Pemberian beasiswa dari perusahaan
25	Pemberdayaan kerja pada lulusan sekolah/kuliah	Magang, praktik kerja lapangan, dll
26	Pengembangan dalam kepemudaan	Pemberian bekal keterampilan bagi pemuda, dukungan pemberdayaan usaha bagi pemuda, dll
27	Peningkatan kualitas hidup masyarakat	Kegiatan pengembangan masyarakat, pemberian pelatihan pada masyarakat
28	Kepedulian terhadap anak-anak	Pelaksanaan berbagai program terkait anak-anak, pengadaan kegiatan edukatif menarik untuk anak-anak
29	Kegiatan amal atau kegiatan sosial	Bantuan bencana alam, donor darah, sunatan massal , dll
30	Mensponsori kegiatan kesehatan, budaya, olahraga hiburan, pendidikan	Melaksanakan berbagai aktivitas bidang bantuan pendidikan, kesehatan, dll
<b>E</b>	<b>Tema lingkungan</b>	
31	Konservasi lingkungan	Pengadaan kegiatan yang mendukung konservasi lingkungan, melakukan konservasi lingkungan lokal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32	Kegiatan mengurangi efek terhadap pemanasan global	Meminimalisasi polusi, pengelolaan limbah, pengelolaan air bersih
33	Pendidikan mengenai lingkungan	Melaksanakan kegiatan terkait dengan pendidikan lingkungan
34	Pernyataan verifikasi independen atau audit lingkungan	Pelaksanaan PKBL (program kemitraan bina lingkungan) telah diaudit, perusahaan menjalankan kegiatan pengelolaan lingkungan yang mencakup sistem audit lingkungan
35	Sistem manajemen lingkungan	Perusahaan menjalankan pengelolaan lingkungan yang mencakup sistem manajemen lingkungan, pernyataan tentang manajemen lingkungan perusahaan
<b>F</b>	<b>Tata kelola perusahaan</b>	
36	Status kepatuhan terhadap syariah	Pernyataan patuh terhadap syariah atau patuh terhadap DSN
37	Struktur kepemilikan saham	Keterangan kepemilikan saham
38	Profil dewan direksi	Profil dewan direksi
39	Pengungkapan melakukan praktik monopoli atau tidak	Melakukan praktik monopoli usaha atau tidak melakukan praktik usaha monopoli
40	Pengungkapan melakukan praktik menimbun bahan kebutuhan pokok atau tidak	Melakukan praktik penimbunan bahan pokok atau tidak melakukan praktik penimbunan bahan pokok
41	Pengungkapan melakukan praktik manipulasi harga atau tidak	Melakukan praktik manipulasi harga atau tidak melakukan praktik manipulasi harga
42	Pengungkapan adanya perkara hukum atau tidak	Adanya perkara hukum atau tidak adanya perkara hukum
43	Kebijakan anti korupsi	Kode etik, <i>whistleblowing system</i> , dll

Sumber : Othman et.al



### 2.1.8 Syariah Enterprise Theory

Syariah enterperise theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggung jawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Enterprise theory kemudian dikembangkan agar teori tersebut lebih dekat lagi dengan konsep syariah sehingga terbentuk teori yang dikenal dengan istilah *Syariah enterprise theory*. Menurut Triyuwono (2007), syariah enterprise theory meliputi allah, manusia dan alam sehingga dalam penelitian ini mengimplikasikan bahwa *stakeholders* tertinggi adalah allah sebagai pusat.

Allah merupakan pihak tertinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia dimana dengan menempatkan allah sebagai *stakeholders* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. *Stakeholders* kedua dari *syariah enterprise theory* adalah manusia yang dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam kontribusi keuangan maupun kontribusi non-keuangan. *Indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, tetapi secara syariah mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Golongan stakeholders yang terakhir dari syariah enterprise theory adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia.

## 2.1.9 Ukuran Perusahaan

### 2.1.9.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Putri (2014) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dihitung dengan beberapa metode. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak (Siregar dan Utama,2005). Selain itu, perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki *public demand* terhadap informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil.

### 2.1.9.2 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan proxy total aset yang diperoleh dari posisi keuangan pada akhir periode dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikarenakan total aset menunjukkan jumlah kepemilikan aset yang dimiliki perusahaan yang dapat dilihat dari penjumlahan aset lancar dan aset tetap, sehingga total aset dinilai lebih dapat menggambarkan suatu perusahaan masuk kedalam kategori ukuran besar atau kecil. Rumus untuk mengukur ukuran perusahaan:

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1.10 Profitabilitas

### 2.1.10.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan entitas bisnis untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham (Putra dan Rahardjo,2011). Menurut Indrayani (2014) profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat akan mendapatkan tekanan dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mengungkapkan laporan pertanggung jawaban yang lebih luas (Amran dan Devi,2008).

### 2.1.10.2 Alat Ukur Profitabilitas

Terdapat tiga indikator pengukuran untuk mengukur rasio profitabilitas antara lain *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) . *Net Profit Margin* untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu, *Return On Asset* untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat aset tertentu, sedangkan *Return On Equity* untuk mengukur pengembalian atas ekuitas saham biasa atau tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. Semakin tinggi rasio profitabilitas berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan semakin luas tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan (Indrayani,2014).

Rumus untuk menghitung profitabilitas antara lain:

1. Menghitung Return On Asset

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2. Menghitung Return On Equity

$$\text{ROE} : \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Equity}}$$

3. Menghitung Net Profit Margin

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan}}$$

### 2.1.11 Kepemilikan Saham Publik

#### 2.1.11.1 Pengertian Kepemilikan Saham Publik

Saham adalah sebagai bentuk penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Martalena dan Maya, 2011: 12) . Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham perusahaan di Indonesia, yang berarti semua aktivitas dan keadaan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai salah satu bagian pemegang saham (Putra dan Rahardjo,2011). Perusahaan yang sahamnya banyak dimiliki publik menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan (deviden) yang layak dan dianggap mampu beroperasi secara terus-menerus, sehingga cenderung akan melakukan pengungkapan informasi sosial lebih luas (Badjuri,2011). Semakin tinggi tingkat kepemilikan publik didalam perusahaan diprediksi akan melakukan pengungkapan yang lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas dikarenakan adanya tekanan dan permintaan dari pemegang saham, agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat yang mana memiliki akses informasi yang terbatas dan hanya dapat mengandalkan pengungkapan dari perusahaan untuk memperoleh informasi (Putra dan Rahardjo, 2011).

### 2.1.11.2 Alat Ukur Kepemilikan Saham Publik

Kepemilikan saham publik dapat diukur dengan menggunakan rasio jumlah kepemilikan lembar saham yang dimiliki oleh publik. Publik sendiri merupakan individu yang memiliki kepemilikan saham dibawah 5% yang berada di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Putra dan Rahardjo,2011). Informasi keuangan yang disampaikan manajemen oleh para investor digunakan untuk menganalisa kinerja manajemen dan kondisi perusahaan dimasa yang akan datang guna mengurangi risiko investasi. Agar publik mau melakukan investasi pada perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko investasi, maka perusahaan harus menampilkan keunggulan dan eksistensi perusahaan terhadap publik. Karena perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan publik yang lebih tinggi akan melakukan pelaporan pertanggung jawaban yang lengkap dan memiliki laporan keuangan yang baik. Rumus untuk mengukur kepemilikan saham publik yaitu:

$$\text{Rasio} : \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Lembar Saham Publik}}{\text{Total Lembar Saham Perusahaan}}$$

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1.12 Pandangan Islam Mengenai Pengungkapan ISR

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna sudah sepatutnya bertakwa kepada Allah SWT. Salah satu bentuk ketakwaan manusia kepada Allah SWT adalah dengan tidak membuat kerusakan dimuka bumi.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-A'raf ayat 56 berikut:

وَلَا تُلْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ  
 رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut ( tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. “. Pada ayat Al-A'raf ayat 56 menjelaskan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk merusak bumi dengan segala isinya. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk khalifah Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT. Tanggung jawab memelihara dan melestarikan ciptaan Allah SWT merupakan wujud konsep akuntabilitas dalam ekonomi islam. Akuntabilitas dimaksudkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, adil dan transparan. Akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada para pemangku kepentingan saja tetapi juga kepada Allah SWT sebagai Dzat yang memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan keberkahan dan kesuksesan. Dengan kata lain akuntabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap *Islamic Social Reporting* sedangkan tipe industri tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Raditya (2012) melakukan penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah (DES) yang memakai variabel independent profitabilitas, ukuran perusahaan, jenis industri, sukuk dan umur perusahaan dan variabel dependent *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitiannya yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* sedangkan jenis industri, sukuk dan umur perusahaan tidak berpengaruh secara terhadap *Islamic Social Reporting*.

Widiawati (2012) yang melakukan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2009-2011 yang memakai variabel independent ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan jenis bank serta variabel dependen *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan jenis bank berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Putri (2014) melakukan penelitian yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011-2012 yang memasukkan variabel independent ukuran perusahaan, profitabilitas dan jenis industri dan variabel dependen *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan jenis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industri berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Penelitian yang dilakukan Khasanah dan Agung (2015) yang berjudul pengaruh kepemilikan saham publik, dewan pengawas syariah dan kepatuhan syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang memasukkan variabel independent kepemilikan saham publik, dewan pengawas syariah dan kepatuhan syariah serta variabel dependen *Islamic Social Reporting* (ISR). Menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham publik dan kepatuhan syariah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* sedangkan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Ma'rifatul (2016) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh GCG, SIZE , jenis produk dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang mengambil variabel independet dewan komisaris, komite audit , SIZE, jenis produk dan kepemilikan saham publik serta variabel dependen *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris, komite audit, SIZE, jenis produk dan kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

Untuk ringkasnya penelitian mengenai *Islamic Social Reporting* (ISR) akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 : Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun penelitian	Judul penelitian	Desain penelitian	Hasil penelitian
1	Haniffa (2005)	The impact of culture and governance on corporate social reporting	1.Variabel dependent: Islamic Social Reporting 2.Variabel independent : ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan beberapa pemegang saham	1. ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan beberapa pemegang saham berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting.
2	Othman et.al (2009)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic Social Reporting pada perusahaan yang listing di bursa malaysia	1.Variabel dependen: Islamic Social Reporting 2.Variabel independent: ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan direksi muslim dan tipe industri 3.Model regresi berganda	1. ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan direksi muslim berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting 2. tipe industri tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting
3	Amalia Nurul Raditya (2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic Social Reporting pada perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah (DES)	1.Variabel dependen : Islamic Social Reporting 2.Variabel Independen: profitabilitas, ukuran perusahaan, jenis industri, sukuk dan umur perusahaan 3. Model regresi berganda	1. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting 2. jenis industri, sukuk dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting
4	Septi Widiawati (2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi	1.Variabel dependen : Islamic Social Reporting	1. ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin  
Arif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

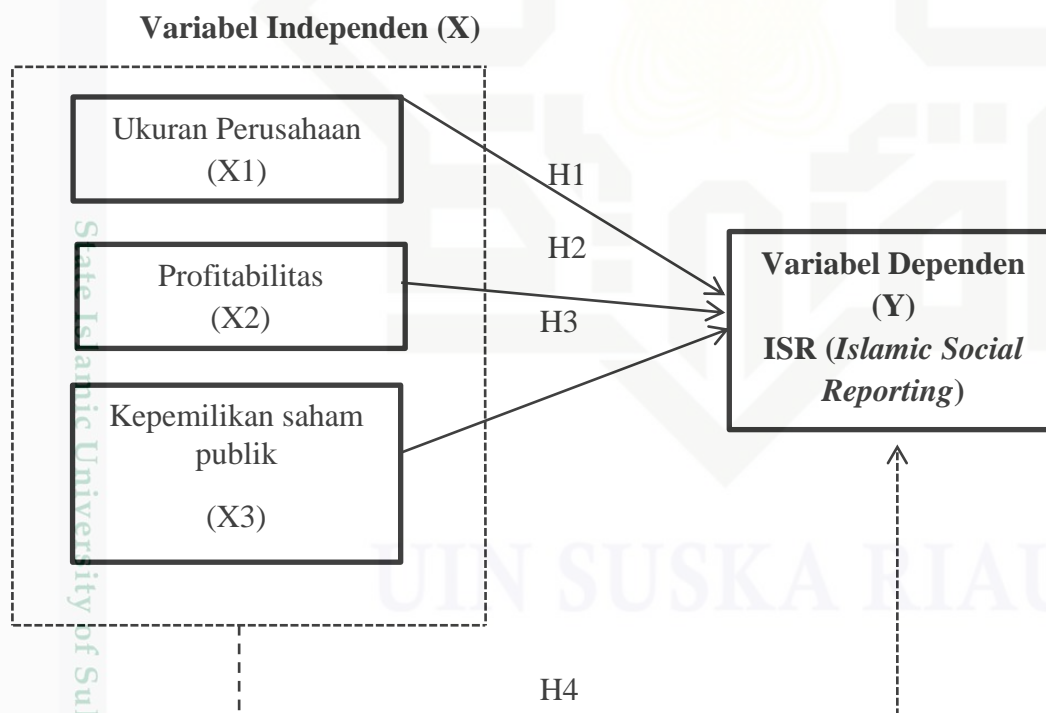
		Islamic Social Reporting pada perusahaan yang masuk Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2009-2011	2. Variabel independen: ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan jenis bank 3. Model regresi berganda	industri dan jenis bank berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting
5	Tri Karina Putri (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic Social Reporting pada perusahaan yang terdaftar di ISSI tahun 2011-2012	1. Variabel dependent: Islamic Social Reporting 2. Variabel Independent: ukuran perusahaan, profitabilitas dan jenis industri 3. Model regresi berganda	1. Ukuran perusahaan dan jenis industri berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting
6	Zayyinatul Khasanah dan Agung Yulianto (2015)	Pengaruh kepemilikan saham publik, dewan pengawas syariah dan kepatuhan syariah terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting	1. Variabel dependen: Islamic Social Reporting 2. Variabel Independen: kepemilikan saham publik, dewan pengawas syariah dan kepatuhan syariah 3. Model regresi berganda	1. kepemilikan saham publik dan kepatuhan syariah berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting 2. dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting
7	Awalya Ma'rifatul (2016)	Pengaruh GCG, SIZE, jenis produk dan kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting	1. Variabel dependent: Islamic Social Reporting 2. Variabel Independent: Dewan Komisaris, Komite audit, SIZE, jenis produk dan kepemilikan saham publik 3. Model regresi berganda	1. Dewan komisaris, Komite audit, SIZE, Jenis produk dan Kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting

Sumber : Data diolah penulis, 2017

## 2.3 Model Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan saham publik terhadap *Islamic Social Reporting* pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada sektor pertanian tahun 2011-2015. Pada penelitian sebelumnya dan teori yang ada, dapat dirumuskan hipotesis bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan saham publik terhadap *Islamic Social Reporting*, sehingga dapat digambarkan dalam skema seperti berikut:

**Gambar 2.1 Model Penelitian**



Sumber : Data di olah penulis, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Ukuran perusahaan

Faktor pertama yang akan di uji adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar akan melakukan aktivitas yang lebih banyak, yang dapat menyebabkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan, memiliki lebih banyak pemegang saham yang mungkin berkepentingan dengan program sosial perusahaan dan laporan keuangan serta menyediakan alat yang efisien dalam mengkomunikasikan informasi sosial perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan semakin banyak (Siregar dan Utama,2005).

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak modal yang ditanamkan sehingga sumber daya dan dana yang besar dalam perusahaan cenderung memiliki permintaan yang lebih luas terhadap laporan informasi perusahaan.

Hal ini sesuai dengan teori *Stakeholder* yang menyatakan bahwa *stakeholder* sebagai pengambil keputusan muslim yang mengharapkan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial berbasis syariah, sehingga membuktikan perusahaan beroperasi sesuai hukum islam. Semakin kuat posisi *stakeholder*, semakin besar pula kecendrungan perusahaan mangadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholder*-nya. Secara lebih spesifik, penelitian yang terkait antara ukuran perusahaan dan ISR pernah dilakukan oleh Othman et al (2009) , Raditya (2012) dan Widiawati (2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

ketiganya sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat ISR.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Otman et al (2009), menduga bahwa perusahaan yang lebih besar akan cenderung melakukan pengungkapan ISR secara lebih luas. Berdasarkan uraian diatas maka dapat di simpulkan hipotesis pertama bahwa:

**H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR (Islamic Social Reporting).**

#### 2.4.2 Profitabilitas

Faktor kedua yang akan diuji terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan untuk melihat keefektivan manajemen suatu perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya (Rahayu,2015).

Perusahaan yang berada pada posisi menguntungkan akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggung jawaban sosial syariah kepada pemegang saham (Anggraini,2006). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profitabilitas perusahaan semakin besar pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dilakukan perusahaan.

Hal ini sesuai dengan teori *legitimasi*, teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi yang diperlukan untuk menginformasikan kepada para pemangku kepentingan *stakeholder* tentang aktivitas operasional bisnis mereka yaitu mengenai pengungkapan laba.

Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu ROA, ROE, dan Net Profit Margin. Penelitian sebelumnya Othman et al (2009), Raditya (2012) dan Widiawati (2012) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ISR. Oleh karena itu, penelitian ini menduga bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan melakukan ISR secara lebih luas. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis kedua bahwa:

**H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR (*Islamic Social Reporting*).**

### 2.4.3 Kepemilikan Saham Publik

Saham adalah sebagai bentuk penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Martalena dan Maya, 2011:12). Rahajeng (2010) berpendapat bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh publik, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan, karena investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang tempat berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan manajemen, sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh publik diduga akan melakukan pengungkapan lebih besar dari perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik. Semakin tinggi tingkat kepemilikan publik didalam perusahaan diprediksi akan melakukan pengungkapan yang lebih luas. Penelitian ini akan menguji variabel kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan sosial dengan menghubungkan bahwa perusahaan akan berupaya memenuhi keinginan publik yang sebagian besar saham tersebut dimiliki masyarakat. Penelitian yang dilakukan Khasanah dan Agung (2015) serta Ma'rifatul (2016) menemukan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Hal ini berkaitan dengan teori agensi yang menjelaskan manajemen adalah agen dari pemegang saham dimana perusahaan manajemen akan berupaya mengoperasikan dan memenuhi keinginan publik (*Stakeholders*) dengan melakukan pengungkapan yang diinginkan publik . Berdasarkan uraian diatas maka dapat di rumuskan hipotesis ketiga bahwa:

**H3 : Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap pengungkapan ISR (*Islamic Social Reporting*).**

#### **2.4.4 Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan saham publik terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR)**

Berdasarkan uraian dan hipotesis masing-masing variabel yang digunakan yaitu : ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan saham publik terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Maka dapat disimpulkan

hipotesis selanjutnya bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).

**H4 : Ukuran perusahaan, Profitabilitas dan Kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

